

AGAMA, KONFLIK SOSIAL DAN KEKERASAN POLITIK

*Oleh: Nur Latifah**

Dosen STID Islahuddini Lombok barat

Abstac: The emergence of social conflict and violence that uses religion as justification has become a problem that adorns the history of violence today. Social conflicts which are followed by acts of violence that use religious issues in Indonesia, certainly do not occur in empty space and apart from some socio-political phenomena that follow. Putting religion as a variant of the potential trigger of social conflict is not easy. This is so, because religion is considered a teaching that is always associated with teachings that are full of values of peace and safety.

The emergence of social conflict in various regions such as, in Ambon, Mataram, Situbondo, Tasikmalaya, Regasdengklok, and other areas, selayang in view can be seen as a religious conflict, but when examined more deeply cannot be separated from the role of the political elite, both at the central level and local. Likewise with the violence experienced by Ahmadiyah congregation groups, it is not too difficult to state that the area of religion has been made as a means of legitimacy and legitimacy in carrying out acts of violence. In this regard, religion has been used as a shield for violent behavior, in the interests of a group of people or an elite.

Kata kunci: Agama dan Konflik Sosial

Pendahuluan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, struktur sosial masyarakat Indonesia kembali mengalami “pembelahan” sosial maupun politik atas dasar suku, ras

* Penulis adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Islahuddiny Mustafa Ibrahim Kediri Lombok Barat

maupun agama. Pembelahan ini dapat dilihat pada adanya kecenderungan kembalinya politik aliran sebagai sebuah identitas baik sosial maupun politik. Akibatnya, kerapuhan hubungan sosial di beberapa daerah terjadi, bahkan ada yang berkeinginan merdeka. Sementara itu, di daerah-daerah lainnya, kerapuhan hubungan sosial berubah menjadi kerusuhan, seperti yang terjadi di Situbondo (1996), Tasyikmalaya (1997), Ragasdengklok (1997), Ambon (2000) dan Mataram (2000), dan beberapa daerah lainnya.

Kerapuhan hubungan sosial yang melahirkan konflik sosial ini, oleh sebagian pihak melihatnya sebagai akibat pembangunan di masa Orde Baru yang salah dalam menerapkan kebijakan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik, sehingga menimbulkan berbagai masalah pembangunan seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, bahkan marginalisasi dan lain sebagainya.¹

Munculnya konflik sosial dan kekerasan yang menggunakan agama sebagai justifikasi telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan dewasa ini. Konflik sosial yang diikuti tindakan kekerasan yang menggunakan isu agama di Indoensia, sudah tentu terjadi tidak dalam ruang kosong dan terlepas dari beberapa fenomena sosio-politik yang mengikutinya. Telaah terhadap konflik sosial di masyarakat tidak cukup hanya melihat dari sisi siapa aktornya, lokasi, dan masa yang terlibat. Dalam menganalisa konflik sosial dengan kekerasan yang menggunakan topeng agama seharusnya terut dipertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik. Sebab, dalam berbagai kesempatan konflik sosial yang diikuti dengan kekerasan atas nama agama yang terjadi sekarang ini merupakan respon balik terhadap fenomena sosio-politik sebelumnya.

Apa yang dipaparkan dalam tulisan ini tentu, bukan merupakan sebuah pemikiran yang final. Yang diajukan dalam tulisan ini berkaitan dengan pendidikan Islam dan konflik sosial diharapkan dapat memancing pemikiran lain, sehingga kita dapat memposisikan pendidikan agama Islam dan konflik sosial, dalam posisi yang sebenarnya.

¹ Sihbudi, Riza dan Much. Nurhasim, ed, *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*, (Grasindo: Jakarta. 2001).hal.3

Agama dan Konflik Sosial.

Pada dasarnya kehadiran agama oleh pemilikNya, dimaksudkan sebagai petunjuk (*hudan*) bagi seluruh manusia. Dalam posisi seperti ini, agama melalui nilai-nilai yang dikandungnya mengajarkan kepada manusia akan perdamaian, kebersamaan sekaligus menebar misi kemaslahatan bagi lingkungan disekitarnya. Namun dalam tataran realitas sosiologisnya, wajah agama tidak seideal seperti yang diharapkan dalam kerangka normativitasnya tersebut. Kerap kali raut wajah agama tampak bopeng, tercoreng dan ternoda dalam kecamuk konflik sosial, budaya, dan politik. Demikian itu sebenarnya bukan kesalahan ajaran agama itu sendiri, namun disebabkan oleh *human error*, yakni sikap sebagian para pemeluk yang kadangkala menafsirkan ajaran *teologis-normatif* secara serampangan.²

Munculnya berbagai konflik sosial dan kekerasan yang mengatasnamakan agama telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan di Indoensia, paling tidak pada masa paruh akhir millenium II, dan awal millennium III. Pada masa ini konflik sosial dan kekerasan atas nama agama semakin menunjukkan eksistensinya. Berbagai rentetan peristiwa kekerasan terjadi sebagai terekam dalam berbagai tempat seperti yang terjadi di Purwakarta, awal Nopember 1995, Pekalongan, akhir Nopember 1995, Tasikmalaya, September 2006, Situbondo, Oktober 1996, Rengasdengklok, Januari 1997, Sampang dan Bangkalan, Mei 1997, Ambon Maluku, 2000, Mataram, 17 Januari 2000,³ dan konflik Ahmadiyah yang terakhir di Sukabumi, 2008.

Meletakkan agama sebagai satu varian potensi pemicu konflik sosial adalah hal yang tidak mudah. Demikian ini, karena agama dianggap sebagai ajaran yang selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan. Sementara dalam suatu konflik sosial yang diikuti dengan tindak kekerasan terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran bahkan kematian. Wajah sejuk agama sangat tidak mungkin diletakkan dengan wajah panas kekerasan. Fakta seringkali menunjukkan bahwa agama dapat memicu terjadinya

² Nasir, Ridwan, dalam kata pengantar buku, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, diterbitkan Atas Kerjasama Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Press dan LKIS: Yogyakarta. 2007.hal. v

³ Opcit, sihbudi.hal..

tindakan kekerasan. Pemeluk agama menjadikan doktrin agama sebagai faktor pemicu kekerasan yang mereka lakukan.⁴

Jangkauan konflik sosial dan kekerasan atas nama agama dapat terjadi di hampir seluruh kawasan di dunia. Di Eropa terjadi *ethnic cleansing* terhadap pemeluk Islam dilakukan pemeluk agama Kristen Bosnia dan Kroasia, di Inlandia memperlihatkan konflik agama antara pemeluk Kristem Katolik dengan Kristen Anglikan. Di India muncul konflik agama Hindu dan Islam, dan konflik Islam dan Nasrani di Filipina, Sudan dan Indonesia.⁵

Terjadinya konflik sosial dan kekerasan yang berbakuan agama disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) adanya klaim kebenaran (*trust claim*). Setiap agama punya kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan pada Tuhan satu-satunya sumber kebenaran. Pluralisme manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknakan. Sebab perbedaan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai refrensi dan latar belakang orang yang meyakinkannya. (2) adanya pengkaburan persepsi antara wilayah agama dan suku mayoritas rakyat Indonesia lebih mensejajarkan persoalan agama dengan suku dan ras. Pemahaman yang kabur ini bisa menimbulkan kerawanan dan kepekaan yang sangat tinggi, sehingga muncul benih-benik sektarianisme. (3) adanya doktrin jihad dan kurangnya sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sebagian tokoh agama sering kali mencela sikap sempit dan tidak toleran pada orang lain yang ingin menganiayanya, pada sisi lain mereka sendiri mempertahankan hak dengan cara memaksa dan menyerang orang yang dianggap menyimpang. (4) minimnya pemahaman terhadap ideologi pluralisme.

Senada dengan ungkapan di atas, secara sosiologis Kasman Singodimejo, mengungkapkan bahwa keterlibatan agama dalam jejak kekerasan di Indonesia didasari oleh enam faktor, yaitu: a) dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama,

⁴ Handoko, Imam Priyo, *Upaya Menjadikan Dunia Lebih Indah*, Kompas, Rabu 15 Februari 2006.

⁵ Fatwa, A. Fajruddin, *Relasi Agama Dalam Konflik Sosial*, dalam Thoha Hamim, ed, 2007, *Resolusi Konflik Islam Indoensia*, diterbitkan Atas Kerjasama Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Press dan LKIS: Yogyakarta.hal.52

b) fanatisme negatif, c) propaganda dan objek dakwah yang salah, d) subsversif sisa G 30S PKI, e) perlakuan tidak adil penguasa, dan f) religio-politik.⁶

Kekerasaan Politik Atas Nama Agama

Demokratisasi yang dilancarkan pasca Orde Baru, melahirkan semangat “*otonomi assosiasional*” atau kebebasan berhimpun cukup terbuka. Setiap warga negara menggunakan haknya membentuk perkumpulan dan organisasi—termasuk pembentukan partai politik yang relatif bebas. Kebebasan meraih *otonomi assosiasional* itu kemudian mendorong warga negara untuk tidak sungkan-sungkan lagi mengekspresikan identitas particular mereka masing-masing. Di masa lalu, identitas particular yang unik, apalagi eksklusif, harus ditanggalkan, untuk kemudian menggantinya dengan identitas-identitas inklusif, yang bisa diterima bersama, antara lain dilakukan melalui penanggalan asas organisasi asosiasional macam apapun, budaya, agama, sosial, ekonomi, bahkan politik, yakni berdasarkan asas tunggal Pancasila.

Sementara itu, wacana tentang kesatuan dan persatuan bangsa—yang sebenarnya juga jargon penting selama Orde Baru—kemudian kembali mengedepan, menjadi sebuah isu politik yang cukup populer di Era Reformasi sekarang ini. Dengan cara dan formulasi mereka masing-masing, hampir semua kekuatan politik di negeri ini mengangkat tema kesatuan dan persatuan. Hanya saja sayangnya, kesatuan dan persatuan seakan hanya berada pada tataran mitos atau semacam diskursus yang jauh dari realitas.

Keterbukaan *otonomi asosiasional* tersebut mengimplikasikan beberapa hal, antara lain yang menonjol adalah terjadinya rejuvenasi atau peremajaan kembali politik aliran. Rejuvenasi tersebut tak urung juga turut menandai dinamika politik pasca Orde Baru. Hal ini bisa dilihat dari komposisi partai-partai di masing-masing daerah yang berjumlah 48 peserta Pemilu 1999, yang kemudian menghasilkan partai-partai besar yang menggambarkan fragmentasi atas dasar semangat keagamaan dan nasionalisme di lain pihak. Memang, harus dicatat juga bahwa masih ada dan

⁶ Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Bina Ilmu: Surabaya. 1990)

jumlahnya cukup signifikan, masyarakat yang mencoba tidak mendasarkan pilihan politiknya berdasarkan aliran, melainkan lebih memakai pragmatisme.

Dalam merekonstruksi tertib sosial (*social order*) di tengah transisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, diharapkan komunitas keagamaan memberi sumbangan positif bagi upaya mengembalikan modal sosial (*social capital*), sikap saling percaya, rasa menjadi sesama anak bangsa. Agama seharusnya menjadi tempat masyarakat menemukan kembali rasa aman, tertib moral dan sosial.

Harapan seperti ini layak mengedepan, karena sesungguhnya pada tataran teologis, begitu banyak anjuran untuk membangun kohesi sosial. Pada tataran sosiologis, Parsons (1991), misalnya menyatakan agama secara universal dipandang sebagai komponen utama dalam integrasi sistem nilai. Jika kita pakai perspektif Durkheim (1992), maka akan kita temukan makna agama sebagai sumber pembentukan keyakinan yang mengikat kehidupan bersama dalam ritual dan pengalaman keagamaan yang sakral. Turner (1994) pun menyatakan bahwa *religion is a social cement, binding individuals and social group into a communal order*. Namun, pertanyaannya mengapa yang menjadi justru konflik keagamaan? Di masa lalu, konflik antara agama dengan negara, sekarang bergeser konflik dan kekerasan antar-agama, dan bahkan juga konflik kekerasan dalam satu dominasi agama yang sama. Di mana sesungguhnya akar konflik jika secara teologis maupun sosiologis dipandang agama memuat pesan dan tata nilai kolektif serta keharusan saling percaya yang dibutuhkan sebagai modal sosial yang berharga?

Jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada pemahaman atau konstruk manusia terhadap agama. Ia terkait dengan bagaimana manusia sebagai aktor yang bertindak memfungsikan pemahamannya atas agama yang diyakini dan bagaimana kemudian menggunakannya untuk mengorganisasi dan merekonstruksi kehidupan sosial.

Jika agama—seperti kata Weber adalah fungsi dari stratifikasi sosial, dan menurut Marx agama sebagai representasi dari kelas sosial, maka mudah dipahami kalau cara aktor memahami agama mengaitkan diri dengan basis material yang melatar-belakangi di mana aktor berperan. Aktor bertindak acapkali bukan atas dasar pesan-pesan teologis-normatif dari agama yang diyakini, melainkan lebih didasarkan pada peran dan status sosial mereka. Penghayatan dan pemahaman keagamaan

masyarakat lapis bawah, lebih berkaitan dengan upaya pembebasan diri dari berbagai belenggu struktural, keterasingan, marginalisasi, dan ketidakpastian hidup mereka secara material maupun sosial. Dengan demikian, bagi mereka agama adalah fungsi dari perjuangan, pembebasan dan pemberdayaan diri.⁷

Sedangkan, dikalangan masyarakat dipuncak lapisan atas agama sering kali dijadikan sebagai sebuah instrumen legitimasi dan bahkan dominasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan urusan manusia berkuasa yang tanpa habis-habisnya selalu berkuat dengan upaya membangun legitimasi dan dominasi. Pemahaman dan praktek fungsi agama sebagai legitimasi dapat dilihat pada perilaku kalangan elite, termasuk elite politik. Oleh sebagian elite, agama tidak jarang dijadikan sebagai tameng untuk meligitimasi suatu tindakan sosial.

Munculnya konflik sosial di berbagai daerah seperti, di Ambon, Mataram, Situbondo, Tasikmalaya, Regasdengklok, dan daerah-daerah lainnya, selang pandang dapat dipandang sebagai konflik agama, namun manakala dikaji lebih dalam tidak lepas dari peran elite politik, baik di tingkat pusat maupun lokal. Begitu juga dengan kekerasan yang dialami oleh kelompok jamaah Ahmadiyah, tidak terlalu sulit untuk menyatakan bahwa wilayah agama telah dijadikan sebagai justifikasi dan legitimasi dalam melakukan tindakan kekerasan. Berkaitan dengan hal ini, agama telah dijadikan sebagai tameng perilaku kekerasan, demi untuk kepentingan sekelompok orang atau elite.

Agama yang semestinya menjadi payung suci (*sacred canopy*) seperti yang dinyatakan Berger (1999), atau persediaan system keyakinan kolektif seperti yang dimaksudkan Durkheim (1992), kemudian berubah makna, agama dijadikan sebagai alat legitimasi dan dominasi. Politisasi agama kemudian menjadi sesuatu yang tak terelakkan karena desakan mempertahankan posisi dan peran kelas beserta privilese yang dinimatinnya.⁸

Fenomena eskalasi penggunaan agama sebagai kendaraan politik hampir menyebar di seluruh negara—termasuk di Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki tradisi sentimen agama yang kuat, Indonesia mengalami berbagai macam kekerasan

⁷ Maliki, Zainuddin, *Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, (Penerbit Galang Press: Yogyakarta. 2004). hal.171

⁸ Ibid..Maliki 2004

yang dilandasi oleh sentimen keagamaan, kekerasan atas nama agama yang terjadi dalam lingkup sosio-politik muncul semenjak berdirinya negara Indonesia, yaitu ketika kalangan Islam menginginkan tatanan sosio-politik negara berdasarkan agama, sedangkan kalangan non Islam tidak menginginkannya dan mengancam memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia.⁹

Pendidikan Islam dan Konflik Sosial

Munculnya berbagai konflik sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Karl Mark konflik sosial yang terjadi pada masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi. Sedangkan menurut Max Weber konflik sosial yang terjadi pada masyarakat tidak hanya disebabkan oleh factor ekonomi, melainkan juga disebabkan oleh factor ideology, kekuasaan, dan bahkan agama.¹⁰

Sementara itu, Craib (1993:107) mengungkapkan, bahwa di dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuatan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau bahkan mengukuhkan status-quo daripada pola hubungan-hubungan kekuatan yang ada dengan yang ingin merombak atau mengubah status-quo itu.

Menurut Coser penyebab terjadinya konflik adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan ditariknya legitimasi dari sistem distribusi yang ada dan intensifikasi tekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang tidak dominan. Selanjutnya penarikan legitimasi itu mempengaruhi variabel-variabel struktur sosial. Tekanan-tekanan yang semakin intensif dipengaruhi oleh konteks sosialisasi dan kendala-kendala struktur yang dipergunakan untuk menekan kelompok-kelompok yang ada (Coser, 1956)

Konflik dalam pandangan Coser dapat dilihat sebagai suatu proses yang dalam kondisi-kondisi tertentu, berfungsi untuk mempertahankan wadah sosial atau bagian-bagiannya. Berdasarkan titik tolak ini, Coser mengembangkan citranya mengenai masyarakat yang memberikan tekanan pada hal-hal sebagai berikut: (1) Dunia sosial dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian

⁹ Opcit..fatwa..hal..62

¹⁰ Baharudin, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Lentera, 2000).hal.45

yang saling berkaitan. (2) setiap sistem sosial memperlihatkan keadaan tidak harmonis, ketegangan dan konflik kepentingan di antara bagian-bagiannya. (3) proses-proses di dalam dan di antara bagian-bagian sistem berlangsung dalam tradisi yang berbeda-beda untuk mempertahankan, mengubah dan menambah (atau mengurangi) integrasi sistem maupun kemampuan penyesuaian. (4) banyak proses, seperti kekerasan, kekhawatiran, penyimpangan dan konflik yang dipandang mempunyai pengaruh negatif terhadap dasar integrasi dari sistem maupun kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.¹¹

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas, Coser mengembangkan perangkat proposisi-proposisi yang agak luas mengenai fungsi konflik bagi sistem sosial. Yang penting adalah analisisnya mengenai sebab-sebab berantai yang mengakibatkan konflik dapat mempertahankan atau membentuk kembali sistem integrasi dan kemampuan menyesuaikan diri pada kondisi-kondisi yang berubah. Di samping itu, Coser juga menyajikan berbagai proposisi mengenai aspek-aspek integrasi dari konflik yang memungkinkan terjadinya gangguan pada sistem sosial.

Proposisi-proposisi tersebut menghasilkan perangkat gejala-gejala pengaruh mempengaruhi, yakni: (1) ketidak-serasian integrasi bagian-bagian itu yang mengakibatkan sistem sosial yang menyebabkan; (2) terjadinya konflik antara bagian-bagian itu yang mengakibatkan, (3) terjadinya integrasi temporer yang dalam kondisi-kondisi tertentu menyebabkan. (4) meningkatnya keluwesan pada struktur sistem, sehingga. (5) meningkatkan kemampuan sistem untuk menanggulangi ketidak-serasian melalui konflik, yang mengarah kepada sistem yang memperlihatkan kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang berubah.¹²

Menurut Coser setidaknya terdapat dua jenis konflik, yaitu konflik yang realistis dan yang tidak realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan pada partisipan, dan yang ditunjukkan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Sementara konflik yang tidak realistis adalah konflik yang

¹¹ Ritzer, George, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).hal

¹² Giddens, Anthony, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).hal.187

bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.¹³

Konflik yang terjadi pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang antara lain: a). masalah hubungan antarmanusia, (2) masalah kepentingan, (3) masalah struktur, dan (4) masalah perbedaan nilai.¹⁴ Konflik yang terjadi adanya masalah dalam hubungan antarmanusia biasanya dipicu oleh emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotif, salah komunikasi dan tingkah laku negatif yang berulang. Komponen-komponen itu sering memunculkan konflik-konflik yang tidak realistis dan tidak perlu. Konflik jenis ini dapat terjadi di mana dan kapan saja.

Konflik kepentingan merupakan konflik yang terjadi karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan atau pun yang secara nyata tidak bersesuaian. Konflik ini terjadi karena suatu pihak lebih yakin bahwa untuk memenuhi kebutuhannya pihak lain harus berkorban. Umumnya konflik jenis ini dipicu oleh: (1) masalah-masalah mendasar seperti uang, sumber daya fisik dan waktu, (2) masalah tata cara, seperti sikap dalam menanggapi suatu masalah, (3) masalah psikologis, seperti persepsi, kepercayaan, kehormatan dan keadilan.

Konflik struktural merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Posisi para dalam konflik jenis ini dipicu oleh pihak penguasa. Sebab, pihak penguasa memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, sehingga pihak ini lebih berpeluang akses sumber daya dan juga mengontrolnya sekaligus menekan akses dan kontrol pihak lain.

Konflik nilai merupakan konflik yang disebabkan oleh ketidaksesuaian sistem-sistem kepercayaan—yang hanya dirasakan ataupun yang benar-benar ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada hidupnya. Sebab, nilai menjelaskan yang baik dan yang buruk, benar atau salah, maupun adil dan tidak adil.

Konflik dapat berwujud sebagai berikut: (1) konflik tertutup (*laten*). Konflik ini dicirikan oleh adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya

¹³ Polama, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers. 1994)

¹⁴ Opcit.maliki,dkk 2013.hal

berkembang dan juga tidak terangkat ke permukaan. Karena itu sering para pihak yang berkonflik tersebut tidak menyadari adanya potensi konflik. Hal itu dikarenakan pada konflik laten yang belum terwujudkan secara terbuka, pertentangan masih dapat dirasionalisasi sehingga untuk sementara harapan dan ego masih dapat diendapkan. (2) konflik mencuat (*emerging*), dan (3), konflik terbuka (*manifest*). Konflik terbuka dapat terbagi ke dalam konflik diadik (mikro) dan konflik kolektif (makro).

Penutup

Konflik sosial dan kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seringkali menjadikan agama sebagai justifikasi telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan dewasa ini. Munculnya konflik sosial yang diikuti tindakan kekerasan, sudah tentu terjadi tidak dalam ruang kosong dan terlepas dari beberapa fenomena sosio-politik yang mengikutinya. Analisis tentang konflik sosial di masyarakat tidak cukup hanya melihat dari sisi siapa aktornya, lokasi, dan masa yang terlibat, melainkan juga perlu dikaji tentang faktor-faktor sosial dan politik sebelumnya.

Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat. Para sosiolog menyebutkan bahwa perbedaan-perbedaan sosial, seperti perbedaan agama, budaya, ekonomi, bahkan politik tidak mungkin bisa dihindari.

Konflik sosial yang mengatasnamakan agama merupakan sebuah relitas sosial. Konflik sosial berdasarkan agama tidak jarang diikuti dengan tindakan kekerasan. Munculnya konflik yang mengatasnamakan agama dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti, adanya klaim kebenaran, rendahnya pemahaman keagamaan, adanya doktrin-doktrin yang provokatif, dan pemahaman pluralisme yang rendah.

Konflik yang menggunakan kekerasan adalah sesuatu realitas yang tidak membutuhkan pembenaran moral, karena kekerasan memiliki pembaruan, membebaskan manusia untuk mengikuti ketentuan tidak rasional dari sifat

bawaannya sendiri. Kekerasan bahkan pada sebagian kalangan sudah menjadi ideologi, gaya hidup dan budaya yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat tidak sepenuhnya benar disebabkan oleh faktor keagamaan, melainkan disebabkan oleh faktor, sosial budaya, ekonomi dan bahkan politik. Dilibatkannya agama oleh kalangan elite—termasuk elite politik dijadikan sebagai legitimasi dan justifikasi suatu tindakan kekerasan terhadap suatu kelompok tertentu.

Konflik berdarah yang terjadi di Maluku misalnya, merupakan refleksi dari pertikaian antara elite politik, baik para politisi di pusat maupun para penguasa local di Maluku sendiri. Terlepas dari berbagai faktor pemicu timbulnya tragedi di Maluku tadi, konflik berdarah tersebut semula bersumber dari ketidakadilan politik yang dilakukan rejim Orde Baru terhadap kelompok Kristen di Ambon. Mereka menganggap bahwa rejim Orde Baru tidak mendistribusikan kekuasaan borokrasi kepada mereka secara proporsional, sehingga keterwakilannya tidak sepadan dengan jumlah mereka yang relative berimbang dengan populasi Muslim di Wilayah Ambon (Surya, Sabtu, 22 Januari 2000).

Seperti diberitahakan bahwa zaman Orde Baru keanggotaan dalam organisasi Islam tertentu memberikan jaminan kepada para anggotanya di Ambon untuk bisa memenangkan berbagai perebutan jabatan di pemerintahan. Kemudian yang didasarkan pada primordialisme agama ini lambat laun membuat kelompok Kristen di Ambon termarginalisasi dari lingkup kekuasaan birokrasi yang sebelumnya pernah mereka kuasai. Ketidakadilan ini menimbulkan perasaan dendam kelompok Kristen yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang Islam. Hubungan patronase Orde Baru dengan organisasi Islam tertentu tersebut memang menghasilkan peluang mobilitas bagi para anggotanya. Sejak menjelang dan awal tahun 1990an rejim Orde Baru telah memberikan berbagai kemudahan kepada anggota kelompok tersebut, sehingga mereka dengan mudah dapat mendominasi posisi-posisi strategis di lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif, baik di pusat pemerintahan Jakarta maupun di daerah seperti Ambon. Monopoli kekuasaan dengan cara menutup akses bagi kelompok lain untuk memasuki struktur kekuasaan inilah yang menjadi pemicu awal dari timbulnya konflik berdarah antar komunitas Muslim dan Kristen di Maluku (Surya, Rabu 12

Januari 2000). Tragedi Maluku memang sangat memprihatinkan, bukan hanya karena besarnya jumlah korban nyawa serta kerugian material saja, tapi karena ternyata telah dimanipulir oleh kelompok Islam tertentu untuk merealisasikan kepentingan politik serta ambisi kekuasaan mereka.

Sekalipun konflik Maluku berawal dari persaingan politik untuk menguasai jabatan birokrasi pemerintahan, konflik ini kemudian dipahami menjadi sebuah perseteruan antar penganut agama. Kesan seperti itu memang tidak bisa dihindari, mengingat mereka yang terlibat dalam konflik tadi telah memanipulir simbol agama yang menjadi identitas khas masing-masing. Mereka membakar simbol institusi agama masjid dan gereja, untuk menegaskan bahwa perseteruan tersebut merupakan konflik antara pengikut Islam dengan Kristen. Kesan “perang agama” tadi menjadi semakin mengemuka, setelah mereka juga berhasil memanipulir simbol-verbal agama *jihad* dan *crusade*. Lebih tragis lagi, para politisi kemudian ikut memanfaatkan simbol-verbal tersebut untuk membangkitkan sentiment keagamaan para pengikutnya. Sekalipun mereka mengetahui bahwa *jihad* dan *crusade* tersebut dapat memperkeruh suasana konflik, mereka tetap menggunakan teriakan perang tersebut untuk memperkokoh hubungan emosional dengan para pendukungnya di wilayah pergolakan Maluku (Gus Dur, Surya, Rabu Januari 2000). Suasana konflik menjadi semakin anarkhis, ketika para politisi tadi mengerahkan massa, untuk menyatakan dukungan mereka terhadap salah satu kelompok agama yang bertikai di Maluku.¹⁵

Masyarakat Muslim perlu menangkal terjadinya manipulasi simbol agama, yang dapat berakhir fatal seperti terlihat dalam konflik berdarah di Maluku. Mereka harus menghindari formalisme dalam mengaksentuasi agama mereka. Formalisme dapat mengungkung potensi dinamis ajaran Islam dan pada gilirannya akan menumbuhkan visi sosial-keagamaan yang sempit.

Daftar Pustaka

Basri, Faisal, H, 1999, *Perkembangan dan Prospek Politik Pasca Pemilu*, Analisis, Nomor 4 Tahun 1999.

¹⁵ Basri, Faisal, H, *Perkembangan dan Prospek Politik Pasca Pemilu*, Analisis, Nomor 4 Tahun 1999..hal.383

- Berger, Peter L, 1990, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas*, LP3ES: Jakarta.
- Baharudin, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Lentera
- Durkheim, Emile, 1992, *The Elementary Form of the Religious Life*, Free Press, New York.
- Fatwa, A. Fajruddin, *Relasi Agama Dalam Konflik Sosial*, dalam Thoha Hamim, ed, 2007, *Resolusi Konflik Islam Indoensia*, diterbitkan Atas Kerjasama Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Press dan LKIS: Yogyakarta.
- Gidden, Anthony, *Perdebatan Kalsik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, Jakarta: Rajawali Pers, 187
- Handoko, Imam Priyo, *Upaya Menjadikan Dunia Lebih Indah*, Kompas, Rabu 15 Februari 2006.
- Hasyim, Umar, 1990, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Bina Ilmu: Surabaya.
- Maliki, Zainuddin, 2000, *Agama Rakyat Agama Penguasa*, Galang Press: Yogyakarta.
- Maliki, Zainuddin, 2004, *Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Penerbit Galang Press: Yogyakarta.
- Nasir, Haidar, 1999, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nasir, Ridlwan, 2007, dalam kata pengantar buku, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, diterbitkan Atas Kerjasama Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Press dan LKIS: Yogyakarta.
- Polama, 1994, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ritzer, George, 2012, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Sihbudi, Riza dan Much. Nurhasim, ed, 2001, *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*, Grasindo: Jakarta.
- Turner, Bryan S, 1994, *Religion and Sosial Theory*, London SAGE Publishing.